

Problematika Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

Fatimah Azzahra Kaloko¹, Nazila Riski Hayati², Riri Maria Fatriani³

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

^{2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

*E-mail correspondence: ririmariafatriani@unja.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2179>

Abstract

This research analyzes the issue of women's representation in the 2019-2024 election of Dairi Regency DPRD members. The qualitative approach method is presented in descriptive form, which is a method that provides a clear and systematic description of a problem. Data collection techniques are interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman interactive model, which is a technique presented in the form of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that women's representation in the 2019-2024 election of Dairi Regency DPRD members showed a percentage below 30% due to the patriarchal culture that is still inherent in society so that matters relating to politics are more synonymous with men. Several factors show that the low awareness of women in Dairi Regency and the lack of political influence make it difficult for women to compete and contribute with men.

Keywords: Political Parties, Regency DPRD members, Women's Representation

Abstrak

Penelitian ini menganalisis persoalan keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024. Metode pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terhadap suatu masalah. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu teknik yang disajikan dalam bentuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024 menunjukkan persentase di bawah 30% dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat sehingga hal-hal yang berkaitan dengan politik lebih identik dengan laki-laki. Beberapa faktor menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran perempuan di Kabupaten Dairi dan minimnya pengaruh politik membuat perempuan sulit untuk bersaing dan berkontribusi dengan laki-laki.

Kata kunci: Partai Politik, Anggota DPRD Kabupaten, Keterwakilan Perempuan

1. Pendahuluan

Peran dan posisi perempuan yang cukup kentara (terlihat/nyata) akan mengalami diskriminasi, dalam hal ini masalah di ranah publik merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Keterwakilan peran dan posisi

perempuan di wilayah Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan masih sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan karena adanya konstruksi sosial budaya yang terbentuk dari masyarakat itu sendiri, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Namun demikian,

keterwakilan perempuan di dunia politik harus tetap menjadi perhatian serius. Pada lembaga legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Utara, keterwakilan anggota perempuan terbilang kecil, hal ini dapat dilihat berdasarkan periode 2004-2009 keterwakilan perempuan hanya 5 anggota pada hal jumlah kursi yang tersedia sebanyak 85 kursi, kemudian pada periode 2009-2014 walaupun terjadi peningkatan 16 anggota legislatif perempuan dari 100 kursi yang tersedia, namun jumlah tersebut belum mencapai kuota 30% sesuai Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pada periode selanjutnya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Sumatera Utara mengalami penurunan, hal ini terlihat pada periode 2014-2019 hanya terdapat 14 keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif dari 100 kursi yang tersedia. Kemudian pada pemilihan anggota legislatif periode 2019-2024, masih terjadi penurunan karena hanya 13 anggota legislatif perempuan dari 100 kursi yang tersedia.

Budaya patriarki adalah sistem yang memposisikan laki-laki sebagai pemilik kekuasaan atau otoritas tertinggi di setiap bidang kehidupan, yang berarti perempuan tidak memiliki kebebasan dan berada satu tingkat di bawah laki-laki. Peran perempuan di Kabupaten Dairi masih rendah karena adanya bentuk budaya patriarki. Kabupaten Dairi yang di dominasi suku batak dengan memegang kuat adat istiadat dan budaya. Menurut (Penabudaya.com, 2021) budaya Suku Batak terdapat sistem kekerabatan yang menerapkan sistem atau sikap dalam memperlakukan orang lain, seperti Elek Marboru dan Somba Marhulu-hula yang merupakan cerminan patriarki antara laki-laki dan perempuan. Dalam setiap acara adat, saudara perempuan biasanya lebih dihormati, sementara saudara laki-laki menjadi raja dan tokoh utama dalam acara

adat tersebut. Berdasarkan hal tersebut dengan melekatnya budaya patriarki yang berjalan di Kabupaten Dairi menyebabkan rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik dan menyebabkan kurangnya kesadaran akan peran perempuan dalam politik.

Kurangnya kesadaran perempuan di Kabupaten Dairi untuk berpartisipasi dalam politik merupakan salah satu bentuk belenggu (ketidakbebasan) dari adanya budaya patriarki yang berjalan. Adanya konstruksi sosial yang terbangun, kesempatan untuk terjun dalam dunia politik menjadi kurang. Perempuan cenderung tidak memiliki kebebasan karena realitas sosial menuntut mereka untuk menjadi ibu rumah tangga. Hal ini adalah masalah besar karena konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang sama.

Hal-hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan beberapa peluang serupa dalam politik salah satunya perempuan memerlukan saluran aspirasi seperti, partai politik. Menurut (Hasriani, 2019) partisipasi perempuan dalam partai politik merupakan wadah yang tepat, karena di dalam partai politik perempuan mendapatkan pendidikan politik dan etika politik. Namun, di Kabupaten Dairi sendiri, partai politik yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik relatif rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya 5% perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Dairi dengan artian partai politik tidak serius dalam memberikan peluang kepada perempuan dalam mengambil peran di kontestasi politik.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Menurut (Sugiyone, 2016) metode kualitatif sering

disebut metode penelitian alamiah karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Selanjutnya dalam hal penyajiannya dilakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas mengenai sistematika permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan ketua, wakil ketua serta anggota DPRD Kabupaten Dairi, anggota DPRD perempuan Kabupaten Dairi, Ketua Partai Demokrat, Golkar Kabupaten Dairi, aktifis perempuan Kabupaten Dairi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi. Data sekunder di dapat dari naskah akademik rancangan UUD pengarusutamaan gender Kabupaten Dairi, Jurnal dan dokumen lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Temuan dari penelitian ini mendeskripsikan berbagai problematika terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi tahun 2019-2024. Dapat dilihat ada 3 poin utama yang menjadi problematika keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Dairi. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang telah peneliti tentukan, maka dapat di uraikan sebagai berikut:

A. Budaya Patriarki

Secara umum budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat, menandakan bahwa laki-laki masih berada dalam posisi berkuasa yang lebih tinggi dari perempuan. Khususnya di daerah Sumatera Utara masyarakat sebagian besar masih menganut Suku Batak, sehingga masyarakat disana masih menganggap posisi perempuan dalam

masyarakat tidak dipandang lebih tinggi dari laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan sebagai yang paling penting, superior, dan dominan dalam masyarakat. Begitu juga pada keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Dairi, akibatnya masyarakat di Kabupaten Dairi yang masih menganut budaya patriarki dengan demikian mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki lebih unggul. Hal tersebut bisa diartikan sebagai sebuah pemahaman akan pandangan yang menyatakan bahwa pria berada di posisi wanita sehingga mereka dapat mengendalikan wanita, budaya semacam ini tumbuh di masyarakat kuno dan menciptakan mitos-mitos tertentu.

B. Kurangnya Kesadaran Perempuan

Kurangnya akan kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik bukan lagi hal yang baru bagi kita. Hal ini sebagian disebabkan oleh budaya patriarki yang sudah tertanam di masyarakat. Kabupaten Dairi, akibatnya kesadaran perempuan untuk terjun ke dunia politik masih sangat minim, dan masih beranggapan bahwa dunia politik hanya milik laki-laki, sedangkan perempuan memiliki kehidupan di rumah. Kelemahan perempuan akibat budaya patriarki adalah:

1) Kurangnya Kesadaran akan Hak Asasi Manusia

Perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak asasi yang sama dengan laki-laki.

2) Kesulitan Mengendalikan Perasaan

Perempuan sering mengalami kesulitan untuk menghilangkan perasaan malu dan takut salah.

3) Kesulitan Mengambil Keputusan

Perempuan kurang dapat berpikir jernih dan logis sehingga sulit mengambil keputusan.

4) Beban Kerja Domestik

Beban kerja domestik perempuan mengacu pada tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak, dan mengurus rumah. Beban kerja domestik seringkali tidak terdistribusi secara adil antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, dan cenderung menjadi tanggung jawab utama perempuan.

5) Banyak Pertimbangan

Perempuan yang selalu mempertimbangkan faktor-faktor keluarga, atau tradisi keluarga yang aktif dalam organisasi.

6) Kurang Mengendalikan Emosi

Perempuan kurang dapat mengontrol emosinya, sehingga pikirannya kurang stabil dan mudah terpengaruh.

C. Kurangnya Pengaruh Partai Politik

Regulasi mengenai syarat 30% caleg perempuan merupakan salah satu kebijakan penting dalam proses perjalanan demokrasi kita. Aturan tersebut tertulis dalam beberapa undang-undang, yaitu UU No. 31 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, dan UU No. 7 Tahun 2017. Tetapi terkadang partai politik hanya menyiapkan caleg perempuan untuk menjadi caleg guna memenuhi keterwakilan 30% perempuan di pencalonan dalam demokrasi, bukan disiapkan untuk duduk di dalam ruang lingkup pemerintahan. Beberapa peran penting yang bisa dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1) Merekrut Kandidat Perempuan yang Berkualitas

Partai politik harus memastikan bahwa mereka merekrut kandidat perempuan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sama dengan kandidat laki-laki. Partai politik harus menempatkan kandidat perempuan di posisi yang strategis sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

2) Menggalang Dukungan untuk Kandidat Perempuan

Partai politik juga harus menggalang dukungan untuk kandidat perempuan mereka dengan cara mempromosikan kandidat perempuan mereka di media massa dan memobilisasi dukungan dari masyarakat.

3) Memberikan Pelatihan dan Pendampingan

Partai politik harus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kandidat perempuan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam ruang lingkup politik, komunikasi, dan membangun jaringan.

4) Meningkatkan Kesadaran akan Penting Keterwakilan Perempuan

Partai politik juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan angka kesadaran masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan, seperti DPRD dan berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak perempuan.

5) Memonitor dan Mengevaluasi Kinerja Anggota DPRD

Setelah terpilihnya anggota DPRD, partai politik harus memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD mereka. termasuk kinerja anggota

perempuan mereka, untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik dan memenuhi janji kampanye mereka.

Pada perwujudan perwakilan perempuan cukup rendah yaitu hanya 5,7%. Tentu saja, pertanyaannya adalah mengapa hal ini terjadi. Berdasarkan wawancara dan kajian literatur yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa problematika keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Dairi, antara lain:

1) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya menganggap perempuan tidak lumrah untuk memimpin. Hal tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan atau situasi, seperti terdapat ketentuan adat yang melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa izin suami atau ayahnya.

2) Faktor Gender

Faktor gender di dalam masyarakat masih dipandang bahwa politik adalah urusannya kaum lelaki dan perempuan cukup melakukan pekerjaan rumah tangga.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi ketika perempuan mengalami kesulitan ekonomi, mereka cenderung lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini membuat perempuan sulit untuk berkompetisi dengan laki-laki yang sudah memiliki modal ekonomi yang stabil.

4) Faktor Partai Politik

Faktor partai politik dalam struktur politik yang didominasi laki-laki menjadi faktor yang mempengaruhi keterwakilan

perempuan di DPRD Kabupaten Dairi. Partai politik juga masih belum memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkompetisi dalam bursa pencalonan sehingga perempuan kurang terwakili dalam daftar calon anggota legislatif.

5) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan masih banyak perempuan yang tidak memiliki kesempatan pendidikan yang memadai, yang juga menjadi alasan mengapa hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam politik.

Keterwakilan perempuan di dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi memiliki problematika-problematikan yang terdapat di dalam prosesnya. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam proses meningkatkan angka kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan dan keterlibatan perempuan di dalam ruang lingkup legislatif, antara lain:

1) Memperkuat Akses Perempuan

Memperkuat akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan politik.

2) Meningkatkan Dukungan

Meningkatkan dukungan adalah peran yang penting, seperti memberikan dukungan finansial dan jaringan politik.

3) Menggalang Kesadaran dan Komitmen

Menggalang kesadaran dan komitmen politik yang lebih kuat terhadap kesetaraan gender di bidang politik.

4) Penerapan Kuota Gender

Penetapan kuota gender adalah suatu kebijakan yang ditetapkan sebagai cara untuk meminimalisir

kecendrungan yang lebih mendominasi keterlibatan kaum laki-laki.

5) Pengendalian Rekrutmen

Pengendalian rekrutmen adalah salah satu langkah yang diambil oleh partai politik dalam proses seleksi, pencalonan, dan penetapan kandidat.

4. Kesimpulan

Perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam politik karena budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena budaya patriarki lebih mengutamakan laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Perempuan merasa didiskriminasi dan kurang dipercaya untuk maju ke panggung politik, hal inilah yang menyebabkan rendahnya rasa percaya diri perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu kurang kesadaran perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik dan juga disebabkan kurangnya dukungan penuh dari partai politik, perempuan hanya menjadi caleg demi memenuhi kuota pencalonan sesuai peraturan yang berlaku. Namun perempuan memiliki sifat yang halus dan lembut, sehingga kita harus mendukung perempuan dan memberikan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis di bidang politik, sehingga perempuan mampu mengimplementasikan sifat halusnya melalui kepemimpinannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat secara umum.

Daftar Pustaka

- Alfiyah, N., & Rika, D. L. (2022). Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan di RT 01 RW 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng Dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2021. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 23-31.
- Elsi, S. D., Fatriani, R. M., & Saadah, M. (2022). PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI. *Journal Publicuho*, 5(3), 776-789.
- Fadli, Y. (2017). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 41-63.
- Hendrarto, H. (2019). PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ERA DEMOKRASI: SEPERCIK WACANA PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGELANG. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 3(1), 56-69.
- Iriansyah, H. S. (2017). Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia: Masyarakat Patriarki. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 8(2), 1-14.
- Madur, M. T. N. (2022). *POLITIK DAN PEREMPUAN (TENTANG TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024)* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan dalam negeri).
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, 9(2), 257-270.
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi politik perempuan pada lembaga legislatif (Studi tentang pencalonan perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019). *ARISTO*, 9(2), 203-228.

- Nurdin, N. (2021). KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN PERIODE 2019-2024: PERAN PARTAI POLITIK. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 129-145.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Renhoat, M. L. (2020). *Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik)* (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).
- Talaohu, A. R. (2021). Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. *BESTERKUNDE*, 1(1), 15-28.
- Wahid, U. (2013). Perempuan dan kekuasaan politik dalam pemilu pada DKI Jakarta tahun 2012. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 29(1), 73-97.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.